

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN(SAP) PADA LAPORAN
KEUANGAN DESA DI DESA TEGIDE'U
KECAMATAN SIROMBU KABUPATEN
NIAS BARAT

By ENZELINA ZAI

15

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN(SAP)
PADA LAPORAN KEUANGAN DESA DI DESA TEGIDE'U
KECAMATAN SIROMBU KABUPATEN NIAS BARAT**

TUGAS AKHIR



Oleh:

ENZELINA ZAI

NPM : 2121015

6

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NIAS

2024

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Ensiklopedia Indonesia, desa adalah suatu kesatuan yang dihuni oleh beberapa keluarga dengan sistem pemerintahannya masing-masing (dipimpin oleh seorang kepala desa) atau kumpulan rumah-rumah yang membentuk satu kesatuan di luar kota.

Dengan menyusun laporan keuangan secara berkala, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, maka desa dianggap sebagai badan hukum yang memerlukan pencatatan keuangan tersendiri dari individu dan kelompok lain dalam masyarakat.

Laporan-laporan ini mencerminkan posisi keuangan desa pada akhir tahun. Periode Tertentu Periode mewakili periode dan kinerja keuangan selama periode tertentu.

Desa wajib menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan mereka. Ini termasuk publikasi laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat setempat dan pemeriksaan oleh auditor independen untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan hukum yang berlaku.

Bendahara desa mencatat proses transaksi yang terjadi di desa dan dibuktikan dengan catatan. Catatan dan laporan keuangan kemudian dibuat, sehingga menghasilkan informasi berupa laporan keuangan untuk digunakan oleh pemangku kepentingan desa.

Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah :

1. Masyarakat desa; Masyarakat bisa mengetahui bagaimana dan untuk apa dana desa digunakan. Dengan adanya akses terhadap informasi keuangan desa, masyarakat dapat lebih terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan pengembangan dan penggunaan anggaran desa.

2. Perangkat desa; Informasi keuangan tingkat desa membantu aparat desa dalam mengambil keputusan seperti alokasi anggaran dan prioritas pembangunan. Pejabat desa dapat menggunakan informasi keuangan untuk memantau realisasi anggaran dan melaksanakan hasil pembangunan.
3. Pemerintahan daerah; Informasi keuangan desa dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan masyarakat setempat.
4. Pemerintah pusat; Informasi keuangan desa membantu pemerintah menyesuaikan kebijakan pengambilan keputusan strategis atas alokasi dana pembangunan nasional, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan di pedesaan.

Praktik akuntansi ditingkat desa sering kali beragam dan tidak konsisten karena belum ada standar yang jelas dan berlaku umum. Akuntansi desa yang tidak terstandarisasi dapat menyebabkan ketidaktransparan dalam pengelolaan keuangan desa serta kesulitan akan membandingkan kinerja keuangan antar desa. Kurangnya konsistensi dan transparansi dalam pelaporan keuangan ditingkat desa karena kurangnya pemahaman standar akuntansi yang berlaku, tuntutan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan yang lebih efektif ditingkat desa sesuai dengan standar yang diterapkan oleh pemerintahan serta dampak negatif terhadap kredibilitas dan integritas pemerintahan desa jika tidak mematuhi standar akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan standar akuntansi pemerintahan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan konsistensi dalam pelaporan keuangan desa.

Laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang kinerja keuangan suatu entitas, seperti desa atau perusahaan. Dalam desa laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan.

²⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur dalam Pasal 32 bahwa format dan isi laporan keuangan pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disampaikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Standar Akuntansi Pemerintahan: Peraturan Nomor 71 Tahun 2012). ⁵⁹ Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah seperangkat prinsip, standar, pedoman, dan prosedur yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan entitas pemerintahan, termasuk desa. ⁹ Standar akuntansi pemerintahan ini dikembangkan oleh Komisi Independen Standar Akuntansi Pemerintahan, ditinjau terlebih dahulu oleh Dewan Audit, dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. ⁹⁹ Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintahan mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Desa Tegide'u merupakan sebuah desa di Indonesia yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Nias, tepatnya di Kabupaten Nias Barat. Desa tegide'u terletak di daerah pedesaan dengan populasi berjumlah beberapa ribu penduduk, terdiri dari keluarga-keluarga yang umumnya berprofesi sebagai petani atau pekerja sektor formal lainnya. Komunitasnya memiliki ikatan sosial yang kuat dan mengenal satu sama lain. Sektor ekonomi utama di desa tegide'u di dominasi oleh pertanian, sayuran, atau buah-buahan sebagai kegiatan utama, beberapa penduduk juga terlibat dalam peternakan atau kerajinan lokal sebagai sumber penghasilan tambahan. Desa tegide'u ini memiliki fasilitas umum seperti kantor kepala desa atau balai desa, pusat kesehatan masyarakat dan ²³ tempat ibadah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa atau lurah yang terpilih secara demokratis, dengan bantuan dari dewan desa dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan dasar kepada penduduk. Masalah yang sering di temui di desa ini adalah keterbatasan sumber daya dan pengetahuan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan observasi awal diketahui bahwa di desa tegide'u kec. Sirombu kab. Nias Barat terdapat banyak perangkat desa yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam manajemen keuangan atau akuntansi yang

dapat mengakibatkan kesulitan dalam pencatatan, pelaporan dan analisis keuangan yang akurat. Masyarakat desa juga tidak mendapatkan informasi keuangan desa yang memadai karena komunikasi yang kurang efektif antara perangkat desa dan masyarakat. Penerapan standar akuntansi yang meningkatkan transparansi dan memperkuat akuntabilitas penggunaan dana publik serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik ditingkat desa. Ini berarti penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam laporan keuangan desa sangat penting untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan adalah akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah dengan mengangkat judul penelitian tentang **“Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Laporan Keuangan Desa di Desa Tegide’u Kec.Sirombu Kab.Nias Barat”**

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dapat ditarik suatu rumusan masalah adalah **“Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Laporan Keuangan Desa di Desa Tegide’u Kec.Sirombu Kab.Nias Barat ?”**

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Laporan Keuangan Desa Di Desa Tegide’u Kec.Sirombu Kab.Nias Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

- Bagi penulis

memperluas pemahaman tentang implementasi standar akuntansi pemerintahan ditingkat desa dan tantangan yang terkait.

➤ Bagi desa

mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan desa melalui penerapan standar akuntansi yang jelas dan konsisten, membantu desa dalam peningkatan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien serta meningkatkan aksesibilitas desa terhadap sumber daya dan pembiayaan eksternal dengan laporan keuangan yang lebih terstruktur dan dapat dipercaya.

➤ Bagi pembaca

Memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat desa.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan standar akuntansi pemerintahan dalam penyajian laporan keuangan di tingkat desa. Data yang di peroleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan individu yang relevan. Wawancara ini melibatkan orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaporan keuangan, seperti sekretaris dan bendahara.

1.6.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini berada pada kantor Desa Tegide'u yang berlokasi di Jl.Tetesua Kec.Sirombu Kab.Nias Barat. Waktu penelitian mulai dari tanggal 1 juli 2024 s/d 1 agustus 2024.

1.6.2 Jenis Dan Sumber Data

▪ Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam studi ini bersifat kualitatif. Data kualitatif merujuk pada data berupa teks, kata-kata atau gambar.

Jenis data yang dimaksud mencakup wawancara, observasi serta dokumentasi.

▪ **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terutama berasal dari data primer yang dikumpulkan melalui proses wawancara dengan individu yang terkait dengan subjek penelitian yang sedang dilakukan.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

- **Observasi**, berdasarkan (Morissan, 2017:143) observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya. Dengan kata lain, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra.
- **Wawancara**, menurut pendapat dari Sugiyono (2017:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

1.6.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan deskriptif dalam proses analisis kualitatif yakni merujuk pada pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan dan meringkas karakteristik dari fenomena yang diamati. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran yang akurat, sistematis, dan komprehensif tentang suatu fenomena tanpa melakukan inferensi atau generalisasi yang mendalam.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

2.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

⁷⁴ Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah seperangkat prinsip, aturan, dan prosedur yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun secara konsisten, ⁷² transparan, dan akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁹ Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (*Standar Akuntansi Pemerintahan : Peraturan Republik Indonesia Nomor* ⁵⁶ *71 Tahun 2010*, 2012). SAP adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

²⁷ Pada tahun 2010, pemerintah mengumumkan peraturan baru tentang standar akuntansi pemerintahan melalui PP No.71 Tahun 2010 yang mengatur penggunaan akuntansi akrual dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah, untuk ¹³ menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual yang dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip akuntansi bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan keuntungan yang dicapai.

2.1.2 Fungsi Dan Tujuan ⁸³ Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Fungsi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

1. Menyediakan **Pedoman** Pengelolaan Keuangan
SAP memberikan pedoman dan aturan yang jelas tentang bagaimana transaksi keuangan harus dicatat, dilaporkan, dan diaudit. Ini memastikan bahwa semua entitas pemerintah mengikuti prosedur yang seragam.
2. Menjamin Keterbukaan dan Akuntabilitas
SAP berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengawasi penggunaan dana publik.
3. Meningkatkan Kualitas Informasi Keuangan
Dengan menerapkan SAP, informasi keuangan yang disajikan akan lebih konsisten, akurat, dan dapat dibandingkan antar entitas pemerintah. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.
4. Memfasilitasi Pengawasan dan Audit
SAP mempermudah proses pengawasan dan audit karena adanya standar yang jelas dan terukur dalam pelaporan keuangan. Hal ini memudahkan auditor dalam menilai kepatuhan dan kinerja pengelolaan keuangan.
5. Mendukung Perencanaan dan Penganggaran
Dengan adanya standar yang jelas, perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan lebih tepat dan efektif. SAP membantu dalam penyusunan anggaran yang realistis dan pengelolaan keuangan yang efisien.

Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

1. Mencapai **Kepatuhan Terhadap Peraturan**
Tujuan utama SAP adalah memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk undang-undang dan peraturan daerah.
2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
SAP bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya pemerintah, serta memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan publik.

3. Memperbaiki Kualitas Informasi Keuangan

SAP berusaha untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun dengan cara yang akurat dan konsisten, sehingga informasi yang disajikan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan.

4. Mendukung Pengambilan Keputusan

Dengan menyediakan informasi keuangan yang tepat dan akurat, SAP membantu pengambil keputusan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam merencanakan dan mengevaluasi kebijakan serta program.

5. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan

SAP berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan memastikan bahwa dana digunakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

6. Mempermudah Proses Audit dan Evaluasi

SAP mempermudah proses audit dengan menyediakan standar yang jelas untuk pelaporan dan pencatatan keuangan, sehingga auditor dapat melakukan evaluasi dengan lebih efisien.

7. Mendorong Perbaikan Berkelanjutan

SAP mendorong entitas pemerintah untuk terus-menerus memperbaiki praktik pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi mereka, sehingga hasil yang dicapai dapat semakin baik dari waktu ke waktu.

Penerapan SAP secara konsisten membantu menciptakan lingkungan pengelolaan keuangan yang sehat dan terpercaya, yang pada akhirnya berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Laporan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa mencakup segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan kinerja desa termasuk hak dan kewajiban desa (sujarweni, 2015).

Laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pemerintah.

Laporan keuangan desa umumnya disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, dan harus diaudit oleh pihak yang berwenang untuk memastikan akurasi dan kepatuhannya terhadap regulasi yang ada.

Penyusunan laporan keuangan desa yang baik melibatkan beberapa tahap, antara lain:

1. Pengumpulan Data: Mengumpulkan semua bukti transaksi keuangan, seperti kuitansi, faktur, dan dokumen pendukung lainnya.
2. Pencatatan: Mencatat semua transaksi ke dalam buku kas umum dan buku pembantu sesuai dengan jenis transaksi.
3. Pengklasifikasian: Mengelompokkan transaksi ke dalam kategori yang sesuai, seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
4. Penyusunan Laporan: Menyusun laporan keuangan berdasarkan data yang telah dicatat dan diklasifikasikan.
5. Verifikasi dan Validasi: Memastikan keakuratan dan kelengkapan data serta memvalidasi laporan sebelum diserahkan kepada pihak berwenang.
6. Penyampaian Laporan: Menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa dan kepada pemerintah melalui mekanisme yang ditetapkan.

Dengan penyusunan laporan keuangan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam laporan keuangan desa, unsur-unsur yang dicakup mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Berikut penjelasan rinci mengenai masing-masing unsur tersebut:

1. Aset

Menurut Siregar (2004: 175), aset adalah suatu barang atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, komersial, atau nilai tukar dan dimiliki oleh suatu badan usaha atau orang perseorangan (individu) (Wahyuni & Khoiruzin, 2020).

Aset desa dapat dibagi menjadi beberapa kategori:

- Aset Lancar: Aset yang dapat dengan mudah diubah menjadi kas atau dikonsumsi dalam jangka waktu satu tahun. Contohnya: Kas dan setara kas, Piutang, Persediaan barang.
- Aset Tetap: Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam operasi desa dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Contohnya: Tanah, Bangunan, Peralatan dan mesin, Kendaraan.
- Aset Tak Berwujud: Aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi. Contohnya: Hak cipta, Hak paten.

2. Kewajiban

Menurut Munawir (2004: 18), seluruh hutang adalah kewajiban keuangan suatu perusahaan kepada pihak lain yang belum dipenuhi, dan hutang tersebut merupakan sumber dana bagi perusahaan atau modal dari kreditur (Maulana & Safa, 2017).

Kewajiban desa dapat dibagi menjadi dua kategori:

- Kewajiban Jangka Pendek: Kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun. Contohnya: Utang usaha, Utang pajak, Beban yang masih harus dibayar.
- Kewajiban Jangka Panjang: Kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Contohnya: Pinjaman jangka panjang.

3. Ekuitas

Menurut PSAK No.21 ayat 2 (IAI: 2004), modal atau ekuitas adalah bagian dari hak milik suatu perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan oleh karena itu merupakan ukuran harga jual perusahaan

tersebut (Nisak, 2018). Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih desa dan dapat dibagi menjadi beberapa komponen:

- Modal Awal: Nilai awal dari modal yang dimiliki oleh perusahaan pada saat pembentukan.
- Modal: Penambahan modal yang berasal dari sumbangan atau hibah.
- Surplus/Defisit: Selisih antara pendapatan dan belanja desa dalam satu periode anggaran. Surplus menunjukkan kelebihan pendapatan atas belanja, sementara defisit menunjukkan sebaliknya.
- Ekuitas Akhir: Total ekuitas perusahaan pada akhir periode pelaporan, yang merupakan penjumlahan dari modal awal, tambahan modal, dan surplus/defisit.

Tabel 2.1 Contoh Ringkasan Laporan Keuangan

Neraca Desa

(per 31 Desember 202X)

Aset		Kewajiban dan Ekuitas	
Aset Lancar :		Kewajiban	
Kas dan Setara Kas	Rp X	Kewajiban Jangka Pendek :	
Piutang	Rp X	Utang Usaha	Rp X
Persediaan	Rp X	Utang Pajak	Rp X
Aset Tetap :		Beban yg msh harus d byr	Rp X
Tanah	Rp X	Kewajiban Jangka Panjang:	
Bangunan	Rp X	Pinjaman Jangka Panjang	Rp X
Peralatan dan Mesin	Rp X	Total Kewajiban:	Rp X
Kendaraan	<u>Rp X</u>	Ekuitas	

Total Aset X	Rp	Modal Awal: Rp X	
		Tambahan Modal	Rp X
		Surplus/Defisit	Rp X
		Ekuitas Akhir	<u>Rp X</u>
		Total Ekuitas: X	Rp

Dengan menyusun laporan keuangan desa yang mencakup unsur-unsur di atas, desa dapat memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan mereka kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.

2.3 Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan utama laporan keuangan menurut PSAK No.45 adalah Memberikan informasi relevan untuk kepentingan donor, anggota organisasi, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya kepada organisasi nirlaba. Laporan keuangan juga memiliki peran penting dalam konteks transparansi, akuntabilitas dan pengambilan keputusan di tingkat desa.

a. transparansi

transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka dengan istilah kejelasan dan keterbukaan informasi. Menurut Nordiawan (2006) transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan dengan mematuhi peraturan.

b. akuntabilitas

Menurut sabeni dan ghozali (2001) menyatakan “akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accounttability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang

12
diembannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya laporan keuangan yang akurat dan teratur, pemerintah desa bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan mereka sehingga memungkinkan pemeriksaan dan evaluasi independen terhadap penggunaan dana publik.

6
c. pengambilan keputusan

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan ditingkat desa. Para pemangku kepentingan dapat mengguakan informasi ini untuk merencanakan anggaran, menetapkan prioritas pembangunan, serta mengalokasikan sumber daya secara efektif.

2.4 Karakteristik Entitas Pemerintahan

Entitas pemerintahan dan bisnis memiliki perbedaan signifikan dalam beberapa karakteristik kunci, terutama terkait dengan tujuan, pembiayaan, dan tujuan sosial. Berikut adalah perbandingan antara keduanya:

Tabel 2.2 perbedaan antara entitas pemerintahan dan bisnis

Karakteristik	Entitas Pemerintahan	Bisnis
Tujuan utama	Memberikan pelayanan publik, keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat	Memaksimalkan laba, menciptakan nilai bagi pemegang saham
Fokus	Kepentingan umum, pemerataan manfaat	Kepuasan pasar, profitabilitas
Sumber pembiayaan	Pajak, pinjaman, dana publik	Penjualan produk, investasi, pinjaman dari lembaga keuangan
Keterbatasan	Ketergantungan pada sumber daya publik, kebijakan fiskal	Ketergantungan pada performa finansial, kepercayaan pasar

Tujuan sosial	Keadilan sosial, pemerataan ekonomi, perlindungan HAM	101 Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dampak sosial-lingkungan
---------------	---	---

Perbedaan antara entitas pemerintahan dan bisnis sangat jelas dalam hal tujuan, pembiayaan, dan tujuan sosial. Entitas pemerintahan lebih berorientasi pada pelayanan publik dan kepentingan masyarakat secara umum, sementara bisnis memiliki fokus utama pada menciptakan nilai ekonomi bagi pemegang saham dengan memenuhi kebutuhan pasar. Meskipun keduanya memiliki tanggung jawab sosial, sifat dan skala tanggung jawab ini dapat bervariasi secara signifikan.

2.5 Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan untuk desa melibatkan beberapa langkah penting, termasuk pencatatan transaksi, penyusunan neraca, laporan operasional, dan laporan ekuitas. Berikut ini langkah-langkah umum untuk menyusun laporan keuangan desa:

1. Pencatatan Transaksi

Pencatatan transaksi merupakan langkah awal dan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan desa. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

- Identifikasi Transaksi: Mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di desa, termasuk penerimaan dan pengeluaran uang.
- Dokumentasi: Mengumpulkan bukti-bukti transaksi seperti faktur, kwitansi, dan dokumen pendukung lainnya.
- Pencatatan: Memasukkan transaksi ke dalam jurnal umum (general journal) berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku.

2. Penyusunan Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu. Untuk desa, langkah-langkah penyusunan neraca antara lain:

- Identifikasi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas: Mengumpulkan informasi mengenai aset desa (seperti tanah, bangunan, dan uang kas), kewajiban (misalnya utang), dan ekuitas (misalnya modal pemerintah desa).
- Klasifikasi dan Penyusunan: Menyusun informasi tersebut ke dalam format neraca yang terdiri dari aset yang diurutkan berdasarkan likuiditas, kewajiban, dan ekuitas.

3. Penyusunan Laporan Operasional

Laporan operasional memberikan gambaran mengenai aktivitas operasional desa dalam periode tertentu, seperti pendapatan dan pengeluaran. Langkah-langkah penyusunan laporan operasional meliputi:

- Pendapatan: Mengidentifikasi semua sumber pendapatan desa, seperti pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya.
- Pengeluaran: Mencatat semua biaya dan pengeluaran operasional desa, seperti gaji pegawai, biaya operasional, dan pembelian barang dan jasa.
- Penyusunan Laporan: Menyusun informasi pendapatan dan pengeluaran ke dalam format laporan operasional yang jelas dan mudah dimengerti.

4. Penyusunan Laporan Ekuitas

Laporan ekuitas (atau laporan perubahan ekuitas) mencatat perubahan dalam ekuitas desa selama periode tertentu, termasuk penyertaan modal pemerintah desa dan distribusi laba atau rugi. Langkah-langkahnya mencakup:

- Identifikasi Perubahan Ekuitas: Menganalisis transaksi yang mempengaruhi ekuitas desa, seperti penyertaan modal baru atau penarikan modal.
- Penyusunan Laporan: Menyusun informasi perubahan ekuitas ke dalam laporan yang menjelaskan saldo awal, transaksi selama periode, dan saldo akhir ekuitas desa.

2.6 Peran Akuntansi Pemerintahan

¹¹ Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP Nomor 71 Tahun 2010 bertujuan untuk mengembangkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah sehingga ¹¹ laporan keuangan yang dihasilkan harus mencakup keadaan keuangan, kinerja dan memuat informasi tentang perubahan keadaan keuangan.

Akuntansi pemerintahan memainkan peran penting dalam sistem perekonomian suatu negara dengan berbagai aspek. Berikut adalah beberapa peran utama dari akuntansi pemerintahan:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas** : Akuntansi pemerintahan membantu dalam menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan sistem akuntansi yang baik, penggunaan dana publik dapat dilacak dengan jelas, dan hal ini mendukung akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.
2. **Pengelolaan Anggaran** : Akuntansi pemerintahan membantu dalam perencanaan, penganggaran, dan pengendalian anggaran publik. Melalui pencatatan yang sistematis, pemerintah dapat memonitor pengeluaran dan pendapatan dengan lebih efektif, serta memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tercukupi sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
3. **Pelaporan Keuangan** : Akuntansi pemerintahan mendukung penyusunan ⁹⁸ dan pelaporan laporan keuangan pemerintah yang akurat, terkait, dan tepat waktu. Laporan keuangan ini penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat, lembaga legislatif, pemerintah pusat, dan pihak lainnya tentang kondisi keuangan dan kinerja pemerintah.
4. **Pemantauan Kinerja** : Melalui sistem akuntansi, kinerja keuangan pemerintah dapat dievaluasi secara berkala. Hal ini mencakup analisis terhadap efisiensi dan ¹² efektivitas pengelolaan sumber daya publik, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

5. Kepatuhan Hukum dan Peraturan : Akuntansi pemerintahan membantu dalam memastikan bahwa pemerintah mematuhi semua hukum, peraturan, dan standar yang berlaku dalam pengelolaan keuangan publik. Ini termasuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, pengelolaan utang, dan penggunaan dana publik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
6. Pengambilan Keputusan : Informasi yang dihasilkan dari akuntansi pemerintahan membantu para pemimpin pemerintah dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Data keuangan yang akurat dan relevan dapat digunakan untuk merancang kebijakan publik, alokasi sumber daya, dan strategi pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, akuntansi pemerintahan berperan sebagai alat yang vital dalam manajemen keuangan publik yang baik. Dengan menerapkan praktik akuntansi yang baik, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan dana publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahannya.

2.7 Peraturan dan Kebijakan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PMK.05/2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.

Berdasarkan hasil dari beberapa pertimbangan yang dilaksanakan oleh menteri keuangan republik indonesia maka memutuskan peraturan menteri keuangan tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat sebagai berikut :

(Kementerian, 2022)

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

2. SAP berbasis akrual adalah sistem yang mencatat pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam laporan keuangan akrual dan mencatat pendapatan, pengeluaran, dan ekuitas dalam laporan pelaksanaan anggaran berdasarkan standar yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan pengeluaran pemerintah .
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan pemerintah pusat. penyajian laporan keuangan.
- 80 5. Lembaga Pelapor adalah instansi pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih lembaga akuntansi atau pelaporan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk menyampaikan laporan keuangan dalam bentuk laporan keuangan.
- 45 6. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang menggunakan anggaran/bahan, maka wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang terintegrasi dengan unit pelaporan.
- 1 7. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara berupa laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini disusun berdasarkan SAP berbasis akrual.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bertujuan untuk:

- a. Memberikan pedoman bagi departemen akuntansi dan pelaporan pemerintah pusat dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan

Laporan Keuangan Departemen/Lembaga Negara (LKKL) Meningkatkan daya banding laporan keuangan.

- 1
- b. memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah pusat.

Pasal 4

1. Ruang lingkup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
 - b. kebijakan pelaporan keuangan;
 - c. kebijakan akuntansi kas dan setara kas;
 - d. kebijakan akuntansi investasi;
 - e. kebijakan akuntansi piutang;
 - f. kebijakan akuntansi persediaan;
 - g. kebijakan akuntansi aset tetap;
 - h. kebijakan akuntansi aset lainnya;
 - i. kebijakan akuntansi kewajiban/utang;
 - j. kebijakan akuntansi ekuitas;
 - k. kebijakan akuntansi pendapatan;
 - l. kebijakan akuntansi biaya, belanja, dan transfer daerah;
 - m. kebijakan akuntansi pembiayaan;
 - n. kebijakan akuntansi Kelebihan Pembiayaan Anggaran/Kelebihan Saldo Anggaran.
 - o. kebijakan akuntansi transitoris; dan
 - p. kebijakan akuntansi pelaporan Dampak Pandemi Corona Virus (COVID-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
2. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Menteri/pimpinan lembaga dapat menyusun petunjuk teknis akuntansi pada departemen/lembaga negara masing-masing dengan mengacu pada Prinsip Akuntansi Pemerintah Pusat yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam menyusun petunjuk teknis akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), departemen/lembaga negara dapat berkoordinasi dengan departemen yang bertanggung jawab di bidang keuangan.

Pasal 6

Pedoman akuntansi pemerintah pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri ini kedepannya akan digunakan untuk penyusunan laporan keuangan masing-masing Kementerian Negara (LKKL), laporan keuangan masing-masing direktorat keuangan negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1729) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1682), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal yg telah ditentukan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tinjauan masa lalu mengacu pada penelitian yang sebelumnya dilakukan pada bidang tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Hasil penelitian-penelitian terdahulu menjadi acuan untuk memahami perkembangan, konsep, dan teori yang ada serta mengidentifikasi kesenjangan

69 pengetahuan yang ada. Bagian ini mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukannya dan menunjukkan apakah penelitian tersebut telah dipublikasikan.

Di bawah ini adalah hasil penelitian sebelumnya mengenai topik yang dibahas oleh penulis.

90 **Tabel 2.3 Peneliti Terdahulu**

Nama penelitian	Judul penelitian	Jenis penelitian	Hasil penelitian
Tri Ikyarti & Nila Aprila (2019)	16 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma	Deskriptif Kualitatif	pemberlakuan standar akuntansi pemerintahan terbukti memberikan dampak positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
30 Dani Rachman, Syifa Vidya Sofwan & Siska Amelia	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Survei Pada Pemerintahan Desa	Deskriptif Pendekatan Kuantitatif	9 peningkatan penerapan standar akuntansi negara dan sistem informasi akuntansi akan menyebabkan peningkatan kualitas pelaporan keuangan desa, dan sebaliknya peningkatan

	Di Kecamatan Arjasari)		<p>9</p> <p>penerapan standar akuntansi negara dan sistem informasi akuntansi kualitas pelaporan keuangan desa akan menurun</p>
<p>34</p> <p>Ni Komang Ayu Hartini (2021)</p>	<p>Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem</p>	<p>Deskriptif Kuantitatif dengan pengambilan sample dan kuesioner</p>	<p>35</p> <p>Penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Hal ini dikarenakan penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berbeda dengan standar akuntansi umum seperti SAK dan IFRS, sehingga penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.</p>

2.9 Kerangka Pemikiran

Dari uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran tentang standar akuntansi pemerintahan pada penyajian laporan keuangan seperti terlihat pada gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 olahan penulis, 2024

BAB III

PEMBAHASAN

76

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa tegide'u yang terletak di jl.tetesua, kecamatan sirombu, kabupaten nias barat merupakan salah satu kantor tempat pelayanan masyarakat di wilayah pedesaan. Sebagai pusat pemerintahan lokal, kantor desa memainkan peran penting dalam mengelola berbagai kegiatan administratif seperti pengelolaan data kependudukan, pembuatan dokumen penting seperti KTP, KK, dan akta kelahiran. Selain itu, kantor desa juga bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa serta pelaksanaan program-program pembangunan. Desa tidak hanya terbatas pada administrasi semata, tetapi juga sebagai tempat untuk musyawarah desa, rapat pemerintahan, dan berbagai kegiatan sosial dan budaya yang mempererat komunitas desa dalam membangun yang lebih baik. Dengan demikian, desa merupakan simbol kesatuan dan pelayanan yang mencakup kebutuhan masyarakat secara luas di tingkat lokal.

3.1.2 Sejarah Singkat Terbentuknya Desa Tegide'u

Desa Tegide'u terbentuk pada Tahun 1947 yang dimana desa masih disebut sebagai Perkampungan. Awal mula terbentuknya Desa Tegideu di pimpin oleh Satola Gara Waruwu atau sering disebut Ama Mbotokhi (Balugu Ikhu) sebagai Kepala Kampung. Saat itu penduduk desa hanya memiliki mata pencaharian dalam hal pertanian. Dari tahun ke tahun desa semakin berkembang dengan penduduk yg semakin meningkat, Dengan sumber daya alam yg memadai kini banyak nya penduduk yang hidup dari hasil pertanian juga perkebunan, peternakan, hingga sebagian memiliki pemasukan dari karya-karya tersendiri hingga ke PNS. Berikut beberapa pejabat kepala desa tegide'u yang pernah menjabat dari tahun ke tahun sampai sekarang:

Tabel 3.1 Daftar Nama-Nama Pejabat Kepala Desa Tegide'u Kec.Sirombu Kab.Nias Barat

No	Nama	Alias/Gelar	Masa Kerja	Keterangan
1	Satola gara waruwu	Ama mbotokhi(balugu ikhu)	1947-1951	Plt. Kep.kampung
2	Faudu'aro waruwu	Ama bazi (balugu hili tora)	1951-1963	Plt. Kep.kampung
3	Atulowa waruwu	Ama sozisokhi wawuwu	1963-1966	Plt. Kep.kampung
4	Fahosi waruwu	Ama daroni waruwu	1966-1968	Plt.kepala desa
5	Rigina daeli	Ina yohane waruwu	1968-1972	Kades defenitif
6	Dalizaro waruwu	Ama feri waruwu	1972-1987	Pj. Kepala desa
7	Husman daeli	Ama ramo daeli	1987-1990	Pj. Kepala desa
8	Yupiter deli	Ama iman daeli	1990-1998	Kades defenitif
9	Nehesi waruwu	Ama refi waruwu	1998-2000	Pj. Kepala desa
10	Adieli waruwu	Ama ricky waruwu	2000-2016	Pj. Kepala desa
11	Ignatius daeli	-	2016-2017	Pj. Kepala desa
12	Elifasi waruwu	Ama oniel waruwu	2017-2023	Kades defenitif
13	Adieli waruwu	Ama ricky waruwu	2023-2024	Pj. Kepala desa

3.1.3 Visi dan Misi

Visi dan misi desa dirumuskan untuk menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh desa dalam jangka panjang dan pendek. Berikut adalah visi dan misi desa tegide'u:

Visi Desa

“Mengedepankan pelestarian budaya, pengembangan ekonomi lokal, dan kesejahteraan masyarakat, untuk mewujudkan desa yang mandiri, berkelanjutan, dan harmonis.”

Misi Desa

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan keterampilan wirausaha, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
3. Menerapkan praktik pembangunan yang ramah lingkungan, termasuk pengelolaan limbah yang efektif dan pelestarian sumber daya alam untuk masa depan yang lebih baik.
4. Mengembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa, serta memperkuat struktur organisasi masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka secara efektif.

Dengan visi dan misi tersebut, desa diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan untuk seluruharganya.

3.1.4 Motto Desa Tegide'u

Pemerintah desa tegide'u memiliki motto: "melayani masyarakat dengan sepenuh hati". Motto pemerintah desa tegide'u ini mencerminkan visi dan misi yang diprioritaskan oleh kepala desa dan perangkat desa dalam mengelola serta memajukan kehidupan masyarakatnya. Motto ini berupa kalimat singkat yang menggambarkan semangat dan tujuan dari pemerintah desa dalam melayani dan memimpin masyarakatnya menuju kesejahteraan yang lebih baik dengan menekankan nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa. Dengan memiliki motto yang kuat dan jelas, pemerintah desa dapat menginspirasi masyarakat untuk bekerja sama dalam membangun komunitas yang berdaya, mengatasi berbagai tantangan, dan meraih potensi yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup secara kolektif.

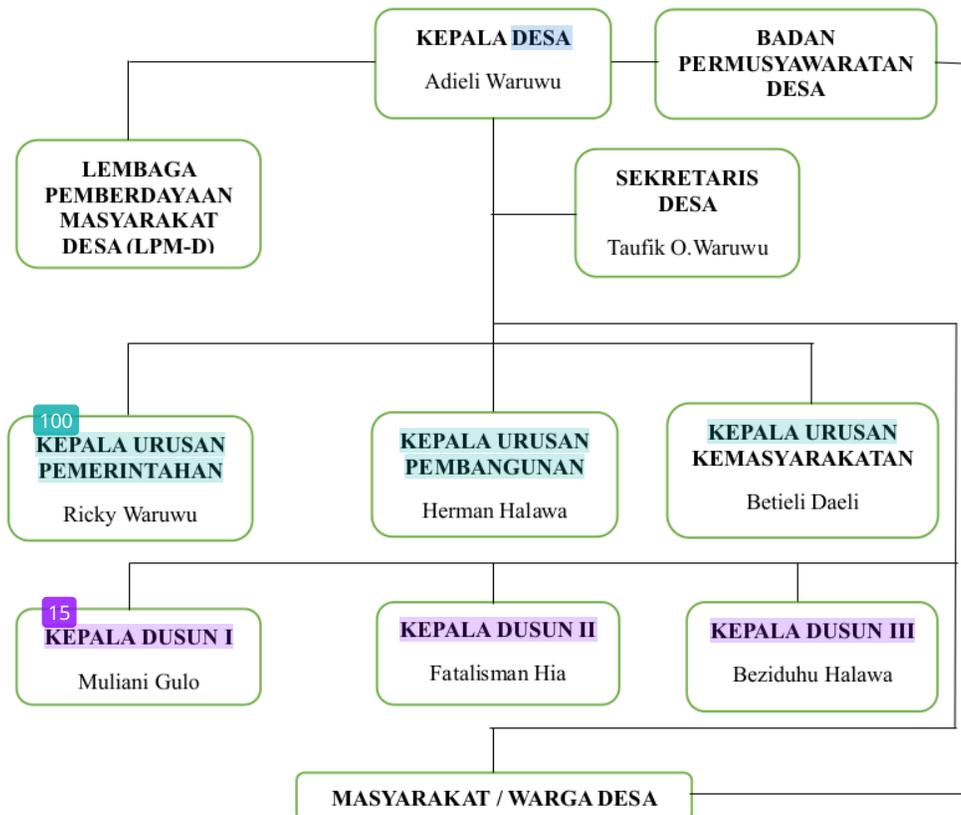
3.1.5 Tujuan Pembentukan Desa Tegide'u

1. Meningkatkan pendapatan penduduknya melalui pertanian yang lebih produktif, pengembangan usaha kecil, atau pariwisata lokal.

2. Menyediakan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dasar, seperti sekolah yang lebih baik dan klinik kesehatan.
3. Meningkatkan kualitas hidup penduduknya dengan membangun atau memperbaiki jalan, listrik, air bersih, dan sanitasi.
4. Menjaga kebersihan lingkungan dan menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan.
5. Mendorong partisipasi aktif warganya dalam pengambilan keputusan lokal, seperti melalui musyawarah desa dan program gotong royong.

3.1.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tegide'u

Gambar 3.1 Struktur Organisasi



Gambar, olahan penulis

3.2 Pembahasan

“Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Laporan Keuangan Desa di Desa Tegide’u Kec.Sirombu Kab.Nias Barat ?”

berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peran akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa dijadikan sebagai alat ukur mewujudkan akuntabilitas dan transparansi desa dimana salah satu peran akuntansi desa adalah menyediakan Informasi keuangan berbagai desa yang lengkap dan akurat untuk memudahkan pembukuan.

Di Desa Tegide’u, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada laporan keuangan desa dilakukan dengan mengikuti pedoman akuntansi yang ditetapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pertama-tama, pemerintah desa dan staf keuangan di Desa Tegide’u mendapatkan pelatihan tentang SAP untuk memahami prinsip-prinsip dasar akuntansi yang berlaku. Menurut Sukirno dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik” (2014), pelatihan adalah elemen kunci dalam implementasi SAP. Sukirno menekankan bahwa pelatihan yang efektif membantu staf pemerintah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan secara tepat.

Dalam proses perencanaan anggaran, desa menyusun anggaran dengan rinci, memastikan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Semua dokumen anggaran disimpan dengan baik untuk referensi dan pertanggungjawaban. Transaksi keuangan, baik pendapatan maupun belanja, dicatat secara akurat sesuai prinsip SAP pada saat terjadinya transaksi. Laporan keuangan desa mencakup laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas, dan laporan operasional. Audit internal dan eksternal dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap SAP dan mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian. Laporan keuangan desa dipublikasikan secara terbuka untuk masyarakat, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa juga memberikan penjelasan mengenai laporan keuangan dan pencapaian program.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada laporan keuangan desa bertujuan untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan akurat,

transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Penyusunan anggaran desa harus dilakukan sesuai dengan prinsip SAP, melibatkan perencanaan yang rinci mengenai alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan. Semua dokumen terkait anggaran harus disimpan sebagai bukti. Pengakuan dan pencatatan transaksi keuangan juga harus mematuhi prinsip SAP, termasuk pengakuan pendapatan dan belanja pada saat terjadinya transaksi, serta pencatatan yang akurat dalam buku pembantu dan buku besar.

J. B. Sayid dalam "*Public Sector Accounting: A Practical Guide*" (2016) menjelaskan pentingnya penyusunan anggaran yang sesuai dengan standar akuntansi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dokumen-dokumen anggaran, termasuk rencana anggaran tahunan dan keputusan musyawarah desa, menunjukkan bagaimana dana dialokasikan sesuai dengan pedoman SAP. Penyusunan laporan keuangan Desa mencakup beberapa jenis laporan penting: **Laporan Realisasi Anggaran**, yang membandingkan anggaran yang direncanakan dengan realisasi pengeluaran dan pendapatan; **Laporan Neraca**, yang menunjukkan posisi keuangan desa pada akhir periode; **Laporan Arus Kas**, yang mengilustrasikan aliran kas masuk dan keluar; dan **Laporan Operasional**, yang menggambarkan hasil dari kegiatan operasional desa.

66

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi yang terjadi selama periode laporan. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana anggaran yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dan bagaimana alokasi anggaran digunakan.

Komponen Utama:

- Pendapatan: Semua sumber penerimaan desa, seperti dana transfer dari pemerintah pusat, pajak daerah, sumbangan, dan lainnya. Laporan ini menunjukkan anggaran yang diperkirakan dan realisasi pendapatan yang diperoleh.

- Belanja: Pengeluaran desa, termasuk ⁶⁷belanja operasional dan belanja modal. Belanja operasional meliputi pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari, sedangkan belanja modal meliputi pengeluaran untuk investasi seperti pembangunan infrastruktur.
- Selisih: Selisih antara anggaran dan realisasi memberikan gambaran apakah pengeluaran dan penerimaan sesuai dengan rencana atau tidak. Selisih positif menunjukkan anggaran belanja tidak terpakai sepenuhnya, sedangkan selisih negatif menunjukkan belanja melebihi anggaran.

Tabel 3.2 Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih	Presentase realisasi %
Pendapatan				
Dana Desa (DD)	Rp 700.000.000	Rp 698.273.000	-Rp 1.727.000	99,7 %
Alokasi Dana Desa	Rp 350.000.000	Rp 335.150.000	-Rp 14.850.000	95,7 %
Hasil pajak & Retribusi	Rp 8.500.000	Rp 8.125.000	-Rp 375.000	95,5 %
Sumber Lainnya	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 0	100 %
Total Pendapatan	Rp 1.058.600.000	Rp 1.041.648.000	-Rp 16.952.000	98,5 %
Belanja				
Penyelenggaraan pemerintah	Rp 410.000.000	Rp 405.370.452	-Rp 4.629.548	98,8 %
Pelaksanaan pembangunan	Rp 230.000.000	Rp 217.861.764	-Rp 12.138.236	94,7 %
Pembinaan kemasyarakatan	Rp 25.000.000	Rp 22.645.400	-Rp 2.354.600	90,6 %
Pemberdayaan masyarakat desa	Rp 170.000.000	Rp 164.405.000	-Rp 5.595.000	99,7 %
Penanggulangan bencana	Rp 173.000.000	Rp 172.800.000	-Rp 200.000	99,8 %
Total Belanja	Rp 1.008.000.000	Rp 983.082.616	-Rp 24.917.384	97,5 %
Surplus (Defisit)	Rp 50.600.000	Rp 58.565.384	Rp 7.965.384	-

Dari data Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada periode tersebut relatif baik, dengan beberapa pencapaian yang memuaskan dan beberapa area yang membutuhkan perhatian. Total pendapatan desa mencapai Rp 1.041.648.000, yang mencerminkan 98,5% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.058.600.000. Meskipun sebagian besar pos pendapatan hampir sesuai dengan anggaran, terdapat kekurangan pada Alokasi Dana Desa dan Hasil Pajak & Retribusi, masing-masing mencapai 95,7% dan 95,5% dari target anggaran. Kekurangan ini, terutama dalam Hasil Pajak & Retribusi, menunjukkan potensi untuk memperbaiki strategi pemungutan pajak atau meningkatkan upaya untuk mendapatkan lebih banyak sumbangan dan hibah.

Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp 983.082.616, yang merupakan 97,5% dari anggaran belanja sebesar Rp 1.008.000.000. Belanja untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana terealisasi hampir sepenuhnya, masing-masing 99,7% dan 99,8%, menandakan pengelolaan anggaran yang efisien dalam area tersebut. Namun, terdapat kekurangan yang signifikan dalam belanja Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan, dengan realisasi masing-masing sebesar 94,7% dan 90,6%. Kekurangan ini mungkin menunjukkan bahwa beberapa proyek pembangunan dan program pembinaan masyarakat mengalami penundaan atau tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai rencana.

Surplus akhir yang tercatat sebesar Rp 58.565.384 menunjukkan bahwa pendapatan melebihi belanja, dengan surplus yang lebih besar dari anggaran surplus yang diperkirakan Rp 50.600.000. Selisih positif sebesar Rp 7.965.384 menunjukkan pengelolaan keuangan yang lebih baik dari yang direncanakan.

55 2. Laporan Neraca

Laporan Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan desa pada suatu titik waktu tertentu. Ini memberikan gambaran tentang apa yang dimiliki (aset), apa yang harus dibayar (kewajiban), dan nilai bersih (ekuitas) dari desa.

Komponen Utama:

- Aset: Semua kekayaan desa, dibagi menjadi:
 - a. Aset Tetap: Aset yang digunakan dalam jangka panjang, seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Aset ini tidak mudah diubah menjadi kas dalam waktu dekat.
 - b. Aset Lancar: Aset yang dapat diubah menjadi kas dalam waktu singkat, seperti kas, piutang, dan persediaan.
- Kewajiban: Kewajiban atau utang yang harus dibayar oleh desa:
 - a. Kewajiban Jangka Pendek: Utang yang jatuh temponya dalam waktu satu tahun, seperti utang kepada pemasok atau tagihan yang harus dibayar.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang: Utang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun, seperti pinjaman jangka panjang.
- Ekuitas: Nilai bersih yang tersisa setelah dikurangi kewajiban dari aset. Ini mencerminkan kekayaan bersih desa yang dapat digunakan untuk kegiatan masa depan.

Tabel 3.3 Laporan Neraca

Aset	Jumlah	Kewajiban	Jumlah
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
- Kas	Rp 50.000.000	- Utang Usaha	Rp 20.000.000
- Piutang	Rp 10.000.000	- Utang Lainnya	Rp 5.000.000
Total Aset Lancar	Rp 60.000.000	Total Kewajiban Jangka Pendek	Rp 25.000.000
Aset Tetap		Kewajiban Jangka Panjang	
-Tanah dan Bangunan	Rp 200.000.000	- Utang Jangka Panjang	Rp 40.000.000
- Peralatan	Rp 30.000.000	Total Kewajiban Jangka Panjang	Rp 40.000.000
Total Aset Tetap	Rp 230.000.000	Ekuitas	Jumlah
Total Aset	Rp 290.000.000	- Modal Desa	Rp 225.000.000
		- Saldo Laba Ditahan	Rp 35.000.000
		Total Ekuitas	Rp 260.000.000
		Total Kewajiban dan Ekuitas	Rp 290.000.000

Laporan Neraca memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan desa pada suatu titik waktu tertentu dengan membagi aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset mencakup semua kekayaan yang dimiliki desa dan dibagi menjadi dua kategori utama: aset tetap dan aset lancar. Aset tetap, seperti tanah, bangunan, dan peralatan, adalah kekayaan yang digunakan dalam jangka panjang dan tidak mudah diubah menjadi kas dalam waktu singkat. Di sisi lain, aset lancar mencakup kas, piutang, dan persediaan yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi kas untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Kewajiban mencerminkan utang yang harus dibayar oleh desa, yang juga terbagi menjadi dua kategori. Kewajiban jangka pendek mencakup utang yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun, seperti utang kepada pemasok dan tagihan yang harus dibayar. Sedangkan kewajiban jangka panjang meliputi utang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun, seperti pinjaman jangka panjang yang memerlukan perencanaan pembayaran lebih lanjut. Ekuitas menunjukkan nilai bersih desa, yaitu selisih antara total aset dan total kewajiban. Ini mencerminkan kekayaan bersih yang dapat digunakan untuk kegiatan masa depan dan investasi. Ekuitas yang positif menunjukkan bahwa desa memiliki lebih banyak aset dibandingkan dengan kewajiban, mencerminkan kesehatan finansial yang baik. Sebaliknya, ekuitas negatif menunjukkan bahwa kewajiban melebihi aset, yang bisa menandakan masalah finansial yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Analisis Laporan Neraca membantu dalam mengevaluasi stabilitas keuangan desa dan memberikan dasar untuk perencanaan keuangan jangka panjang serta pengambilan keputusan yang strategis.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menunjukkan aliran kas masuk dan keluar dari desa selama periode tertentu. Ini penting untuk memahami seberapa baik desa mengelola kasnya dan bagaimana kas digunakan dalam kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan.

Komponen Utama:

- Arus Kas dari Aktivitas Operasi: Menunjukkan kas yang diterima dan dikeluarkan dari aktivitas operasional sehari-hari, seperti penerimaan dari pajak dan pengeluaran untuk gaji.
- Arus Kas dari Aktivitas Investasi: Menunjukkan kas yang diterima atau dikeluarkan dari transaksi yang melibatkan aset tetap, seperti pembelian atau penjualan aset.
- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan: Menunjukkan kas yang diperoleh dari atau dibayarkan untuk utang atau pinjaman, seperti penerimaan pinjaman atau pembayaran utang.
- Total Perubahan Kas: Perubahan keseluruhan dalam kas selama periode laporan, mengindikasikan apakah kas desa meningkat atau menurun.

Tabel 3.4 Laporan Arus Kas

Uraian	Jumlah
Arus Kas dari Kegiatan Operasi	
- Penerimaan Kas	Rp 155.000.000
- Pengeluaran Kas	Rp 145.000.000
Kas Bersih dari Kegiatan Operasi	Rp 10.000.000
Arus Kas dari Kegiatan Investasi	Rp -30.000.000
Kas Bersih dari Kegiatan Investasi	Rp -30.000.000
Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan	
- Penerimaan Pinjaman	Rp 40.000.000
- Pelunasan Utang	Rp -20.000.000
Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan	Rp 20.000.000
Perubahan Kas Bersih	Rp 0
Saldo Kas Awal	Rp 50.000.000
Saldo Kas Akhir	Rp 50.000.000

Analisis arus kas desa menunjukkan bahwa selama periode tertentu, desa berhasil mempertahankan keseimbangan kas dengan hasil yang positif dalam beberapa aspek pengelolaan keuangan. Dari kegiatan operasional, desa menghasilkan kas bersih sebesar Rp 10.000.000, menandakan bahwa pendapatan

dari kegiatan operasional melebihi pengeluaran kas yang diperlukan untuk menjalankan operasi sehari-hari. Namun, dalam kegiatan investasi, desa mengalami arus kas bersih negatif sebesar Rp -30.000.000, yang menunjukkan bahwa pengeluaran untuk investasi melebihi kas yang diperoleh dari sumber investasi, mencerminkan upaya desa untuk memperluas kapasitas atau meningkatkan infrastruktur dengan dampak langsung pada saldo kas.

Dalam hal pendanaan, desa berhasil memperoleh kas bersih sebesar Rp 20.000.000, berkat penerimaan pinjaman yang lebih besar dibandingkan dengan pelunasan utang. Ini menunjukkan bahwa desa menambah utang baru untuk mendukung kegiatan atau investasi, sementara juga melunasi sebagian utang lama. Meski demikian, saldo kas akhir tetap sama dengan saldo kas awal sebesar Rp 50.000.000, menunjukkan bahwa perubahan kas bersih selama periode tersebut adalah nol. Ini mencerminkan kemampuan desa untuk menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran kas secara keseluruhan. Secara keseluruhan, meskipun terdapat pengeluaran untuk investasi, desa menunjukkan manajemen kas yang efektif, berhasil menjaga stabilitas keuangan dengan saldo kas akhir yang tidak berubah.

4. Laporan Operasional Desa

Laporan Operasional Desa (kadang disebut Laporan Realisasi Kinerja Operasional) menguraikan kegiatan operasional desa dan bagaimana anggaran dialokasikan dan digunakan untuk mencapai tujuan desa. Ini memberi gambaran tentang efektivitas pelaksanaan program dan proyek desa.

Komponen Utama:

- Kegiatan Operasional: Menjelaskan kegiatan utama yang dilakukan desa, seperti program pembangunan infrastruktur, kegiatan sosial, atau pelayanan publik.
- Anggaran Kegiatan: Menunjukkan anggaran yang dialokasikan untuk setiap kegiatan operasional.

- Realisasi Kegiatan: Menunjukkan bagaimana anggaran digunakan untuk masing-masing kegiatan. Ini termasuk pencapaian atau hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
- Evaluasi dan Analisis: Menilai seberapa baik kegiatan operasional dilaksanakan dibandingkan dengan rencana. Ini bisa mencakup analisis penyebab perbedaan antara anggaran dan realisasi, serta dampak dari kegiatan operasional terhadap masyarakat.

Tabel 3.5 Laporan Operasional

Uraian	Jumlah
Pendapatan operasional	
-pendapatan dari pajak	Rp 90.000.000
-pendapatan dari hibah	Rp 50.000.000
Total pendapatan operasional	Rp 140.000.000
Belanja operasional	
-belanja langsung	Rp 120.000.000
-belanja tidak langsung	Rp 25.000.000
Total belanja operasional	Rp 145.000.000
Surplus(defisit) operasional	Rp -5.000.000

Total **Pendapatan Operasional** desa adalah Rp 140.000.000, yang terdiri dari Rp 90.000.000 dari pajak dan Rp 50.000.000 dari hibah. Pendapatan ini mencerminkan sumber utama kas yang diperoleh desa untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Di sisi lain, **Belanja Operasional** desa mencapai Rp 145.000.000, dengan rincian Rp 120.000.000 untuk belanja langsung dan Rp 25.000.000 untuk belanja tidak langsung. Total belanja ini menunjukkan total pengeluaran desa untuk berbagai kegiatan operasional, baik yang langsung terkait dengan penyelenggaraan kegiatan maupun pengeluaran pendukung. Hasil dari perhitungan **Surplus (Defisit) Operasional** adalah Rp -5.000.000. Angka negatif ini menunjukkan defisit, yang berarti bahwa belanja operasional desa melebihi pendapatan operasionalnya sebesar Rp 5.000.000. Defisit ini mengindikasikan bahwa desa mengalami kekurangan dana dalam membiayai seluruh belanja operasionalnya hanya dengan mengandalkan pendapatan yang ada.

Defisit operasional yang tercatat sebesar Rp 5.000.000 menunjukkan tantangan dalam pengelolaan keuangan desa. Pendapatan yang diterima dari pajak dan hibah tidak cukup untuk menutupi seluruh belanja yang diperlukan. Hal ini mungkin mengindikasikan perlunya evaluasi dalam pengelolaan belanja, kemungkinan perlu adanya pengurangan biaya atau upaya untuk meningkatkan pendapatan melalui sumber lain, seperti pengoptimalan pajak atau peningkatan hibah. Defisit ini juga dapat mempengaruhi keseimbangan kas dan memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan keuangan untuk memastikan keberlanjutan operasional desa dan mencegah potensi masalah keuangan di masa depan.

Kendala-Kendala yang di Hadapi Pemerintahan Desa dalam Penerapan Standar Akuntansi :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten
Aparatur desa belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai untuk menerapkan standar akuntansi dengan benar.
2. Keterbatasan infrastruktur teknologi
Infrastruktur teknologi yang mendukung, seperti perangkat komputer dan akses internet, masih sangat terbatas sehingga menyulitkan desa dalam menjalankan proses akuntansi yang memerlukan teknologi.
3. Minimnya pelatihan dan sosialisasi
Kurangnya pelatihan dan sosialisasi terkait standar akuntansi pemerintahan membuat aparat desa kurang sepenuhnya memahami aturan dan prosedur yang harus diikuti.
4. Keterbatasan anggaran
Anggaran yang terbatas sering kali menjadi kendala dalam implementasi standar akuntansi, terutama untuk kegiatan pelatihan, pengadaan perangkat lunak akuntansi, dan peningkatan sumber daya manusia.

Hasil Wawancara

1. **Peneliti** : Bagaimana Desa Tegide'u menerapkan standar akuntansi pemerintahan?

Informan I : Desa Tegide'u menerapkan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan regulasi dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ini mencakup tata cara pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Desa memiliki sistem akuntansi yang sesuai untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Dimana Sistem ini mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan transparan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Aparat desa, seperti Kepala Desa dan Sekretaris Desa, perlu mendapatkan pelatihan mengenai akuntansi dan pengelolaan keuangan. Pelatihan ini membantu mereka memahami dan menerapkan standar akuntansi dengan benar. Desa menyusun laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan ini harus disusun sesuai dengan format dan prinsip yang diatur dalam SAP. Penerapan standar akuntansi pemerintahan juga mencakup prinsip transparansi dan akuntabilitas. Desa harus memastikan bahwa informasi keuangan dapat diakses oleh masyarakat dan bahwa laporan keuangan disampaikan secara terbuka.

2. **Peneliti** : Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintahan desa dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan?

Informan I : Aparatur desa belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai untuk menerapkan standar akuntansi dengan benar. Infrastruktur teknologi yang mendukung, seperti perangkat komputer dan akses internet, masih sangat terbatas sehingga menyulitkan desa dalam menjalankan proses akuntansi yang memerlukan teknologi. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi terkait standar akuntansi pemerintahan membuat aparat desa kurang sepenuhnya memahami aturan dan prosedur yang harus diikuti. Anggaran yang terbatas sering kali menjadi kendala

dalam implementasi standar akuntansi, terutama untuk kegiatan pelatihan, pengadaan perangkat lunak akuntansi, dan peningkatan sumber daya manusia.

3. **Peneliti** : Bagaimana prosedur dalam penyusunan laporan keuangan desa? Apakah sudah sesuai standar akuntansi pemerintahan ?

Informan 2 : Di mulai dari pengumpulan data transaksi dengan tahapan pencatatan transaksi dan dokumentasi yang didukung oleh bukti transaksi yang sah seperti kuitansi, nota, dan kontrak. baru dilakukan pengelolaan dan pengklasifikasian akun dengan mengelompokkan akun yang sesuai, penyusunan buku pembantu, dan dilanjutkan dengan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Arus Kas Dan Neraca. Penyusunan laporan keuangan desa harus mematuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di sektor pemerintahan. Dan juga Mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan peraturan terkait lainnya.

4. **Peneliti** : Bagaimana mekanisme pelaporan keuangan desa?

Informan 2 : Mekanisme pelaporan keuangan desa dimulai dengan pencatatan rutin transaksi keuangan dalam buku kas dan jurnal, didukung oleh dokumen sah seperti kuitansi dan nota. Laporan keuangan disusun secara bulanan, triwulanan, dan tahunan, mencakup laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, dan laporan operasional. Setelah penyusunan, laporan tersebut ditinjau oleh Kepala Desa dan perangkat desa sebelum disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk audit dan evaluasi. Untuk memastikan transparansi, laporan tahunan dipublikasikan kepada masyarakat desa melalui papan pengumuman atau media lain. Audit dilakukan oleh Inspektorat atau BPK untuk menilai kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Temuan audit ini kemudian diperbaiki untuk meningkatkan pengelolaan keuangan. Evaluasi berkala

terhadap sistem akuntansi dilakukan untuk memastikan prosedur diikuti dengan baik, dan perbaikan dilaksanakan berdasarkan hasil audit untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pelaporan keuangan desa.

5. **Peneliti** : Bagaimana tingkat pemahaman para pengelola dalam penyusunan laporan keuangan desa untuk mencapai kinerja yang lebih baik?

Informan 3 : Tingkat pemahaman pengelola desa mengenai penyusunan laporan keuangan berada pada level standar dimana cenderung dapat menyusun laporan keuangan dengan akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun mungkin masih ada ruang untuk perbaikan. Dengan pemahaman yang standar, pengelola desa biasanya mampu mengikuti prosedur dasar akuntansi dan pelaporan, seperti pencatatan transaksi yang tepat, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, dan laporan operasional. Mereka juga memahami prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan dan kontrol internal, yang memungkinkan mereka untuk mengelola dana desa dengan lebih efisien dan transparan. Namun, meskipun pemahaman berada pada tingkat standar, pengelola mungkin masih menghadapi tantangan dalam menangani kompleksitas kasus keuangan yang lebih rumit atau perubahan regulasi terbaru. Tingkat pemahaman yang standar mungkin tidak cukup untuk mengidentifikasi dan mengatasi semua potensi masalah atau untuk mengoptimalkan proses pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mencapai kinerja yang lebih baik, pengelola desa harus terus meningkatkan pengetahuan mereka melalui pelatihan lanjutan, pembaruan informasi terkait regulasi keuangan, dan implementasi praktik terbaik dalam akuntansi pemerintahan. Dengan cara ini, mereka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan penggunaan anggaran desa yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

6. **Peneliti** : Seberapa sering laporan keuangan desa di publikasikan kepada masyarakat desa?

Informan 3 : Sesuai tahapan pencairan dana desa dimana sekali setahun. Mekanisme publikasi dilakukan melalui saluran yang mudah diakses

masyarakat, seperti papan pengumuman desa, situs web resmi desa, atau media sosial, untuk memastikan informasi dapat diperoleh oleh seluruh anggota komunitas. Publikasi yang rutin dan transparan ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa, tetapi juga memastikan bahwa informasi mengenai penggunaan anggaran dan dana desa disampaikan dengan jelas kepada publik.

7. **Peneliti** : Apakah masyarakat berhak meminta laporan keuangan desa?

Informan 3 : Ya, masyarakat memiliki hak untuk meminta laporan keuangan desa. Sebagai bagian dari prinsip ¹¹⁴transparansi dan akuntabilitas ¹¹⁰dalam pengelolaan dana publik, masyarakat berhak untuk memperoleh ¹⁰⁸informasi mengenai penggunaan anggaran dan pengelolaan keuangan desa. Hak ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan negara.

KESIMPULAN DAN SARAN**4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil laporan keuangan desa, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menunjukkan upaya yang signifikan dalam mengikuti pedoman akuntansi yang ditetapkan. Laporan keuangan menunjukkan bahwa pendapatan dan belanja operasional dicatat sesuai dengan standar, namun masih terdapat beberapa ketidaksesuaian, khususnya dalam pengakuan dan pengukuran aset tetap serta pelaporan kewajiban. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan dalam penerapan SAP, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan desa mengalami peningkatan, tetapi adanya defisit operasional dan selisih antara anggaran dan realisasi menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Tantangan seperti kurangnya pemahaman mengenai SAP, pelatihan yang terbatas, dan dukungan teknologi yang belum memadai mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

4.2 Saran

Bagi desa Untuk memperbaiki penerapan SAP, disarankan agar desa meningkatkan pelatihan dan pendidikan terkait SAP, memperkuat pengawasan internal dan eksternal, serta berinvestasi dalam teknologi akuntansi yang sesuai, meningkatkan kapasitas pengelola keuangan melalui pelatihan berkelanjutan mengenai prinsip akuntansi dan penggunaan teknologi informasi yang tepat. Desa harus secara rutin mempublikasikan laporan keuangan dan meningkatkan transparansi untuk membangun kepercayaan masyarakat serta memperkuat akuntabilitas. Implementasi sistem kontrol internal yang ketat sangat penting untuk mencegah

penyalahgunaan dan memastikan pengelolaan dana desa yang efektif.

Bagi peneliti
selanjutnya

Melakukan penelitian yang lebih mendalam dan luas tentang penerapan standar akuntansi di berbagai desa, dengan fokus pada kualitas implementasi dan dampaknya terhadap transparansi serta akuntabilitas. Peneliti juga disarankan untuk mendokumentasikan studi kasus dari desa yang berhasil mengeksplorasi faktor konteks lokal yang mempengaruhi penerapan standar, dan melakukan pemantauan berkelanjutan untuk menilai perubahan seiring waktu.

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN(SAP) PADA LAPORAN KEUANGAN DESA DI DESA TEGIDE'U KECAMATAN SIROMBU KABUPATEN NIAS BARAT

ORIGINALITY REPORT

32%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	jdih.kemenkeu.go.id Internet	170 words — 2%
2	ejournal.unsrat.ac.id Internet	122 words — 1%
3	www.bappedaniasbaratkab.org Internet	112 words — 1%
4	datacenter.ortax.org Internet	108 words — 1%
5	www.scribd.com Internet	106 words — 1%
6	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	94 words — 1%
7	peraturan.bpk.go.id Internet	93 words — 1%
8	www.regulasip.id Internet	88 words — 1%
9	123dok.com Internet	76 words — 1%

10	docplayer.info Internet	58 words — 1%
11	www.researchgate.net Internet	56 words — 1%
12	geograf.id Internet	50 words — 1%
13	imademastramad.blogspot.com Internet	48 words — 1%
14	etheses.uin-malang.ac.id Internet	46 words — 1%
15	repository.syekhnurjati.ac.id Internet	44 words — < 1%
16	repository.unhas.ac.id Internet	44 words — < 1%
17	repository.uir.ac.id Internet	43 words — < 1%
18	allinmyall.blogspot.com Internet	41 words — < 1%
19	eprints.walisongo.ac.id Internet	38 words — < 1%
20	tambahpinter.com Internet	37 words — < 1%
21	pt.scribd.com Internet	36 words — < 1%

22	repo.darmajaya.ac.id Internet	34 words — < 1%
23	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	32 words — < 1%
24	repository.unisbablitar.ac.id Internet	32 words — < 1%
25	loveakuntansi.blogspot.com Internet	30 words — < 1%
26	id.scribd.com Internet	29 words — < 1%
27	lib.unnes.ac.id Internet	29 words — < 1%
28	digilib.uinkhas.ac.id Internet	26 words — < 1%
29	repository.iainbengkulu.ac.id Internet	26 words — < 1%
30	ejournal.unibba.ac.id Internet	25 words — < 1%
31	artikelpendidikan.id Internet	24 words — < 1%
32	duniafintech.com Internet	24 words — < 1%
33	kleido.com Internet	24 words — < 1%

repository.unigal.ac.id

34	Internet	24 words — < 1%
35	e-journal.unmas.ac.id Internet	22 words — < 1%
36	jurnal.untag-sby.ac.id Internet	21 words — < 1%
37	pdfcoffee.com Internet	21 words — < 1%
38	repository.penerbitwidina.com Internet	21 words — < 1%
39	repository.upi.edu Internet	21 words — < 1%
40	id.123dok.com Internet	20 words — < 1%
41	konsultasiskripsi.com Internet	20 words — < 1%
42	akuntansiut.wordpress.com Internet	18 words — < 1%
43	text-id.123dok.com Internet	18 words — < 1%
44	e-journal.uajy.ac.id Internet	17 words — < 1%
45	jdi.h.pom.go.id Internet	17 words — < 1%
46	repository.ub.ac.id	

Internet

17 words — < 1%

47 sudisempadian-sudisempadian.blogspot.com

Internet

17 words — < 1%

48 www.solider.id

Internet

17 words — < 1%

49 journal.uniku.ac.id

Internet

16 words — < 1%

50 jurnal.untan.ac.id

Internet

16 words — < 1%

51 sukabumikota.go.id

Internet

16 words — < 1%

52 ceceppermanasuhendar.blogspot.ca

Internet

15 words — < 1%

53 ejournal.uncen.ac.id

Internet

15 words — < 1%

54 dellaanggraeni.blogspot.com

Internet

14 words — < 1%

55 www.coursehero.com

Internet

14 words — < 1%

56 Vania Annissa Holle, Agustinus Salle, Mariolin Sanggenafa. "PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua)", JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH, 2020

13 words — < 1%

-
- 57 criskuntadi.blogspot.com
Internet 13 words — < 1%
-
- 58 ditjenpp.kemenkumham.go.id
Internet 13 words — < 1%
-
- 59 eprints.iain-surakarta.ac.id
Internet 13 words — < 1%
-
- 60 jdih.dairikab.go.id
Internet 13 words — < 1%
-
- 61 [Getruida Neni Revina Najoan, Jantje J. Tinangon, Stanley Kho Walandouw. "EVALUASI PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN AKTIVA TETAP MENURUT PP NO. 71 TAHUN 2010 PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SULAWESI UTARA", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2018](#)
Crossref 12 words — < 1%
-
- 62 eprints.perbanas.ac.id
Internet 12 words — < 1%
-
- 63 idnfinancials.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com
Internet 12 words — < 1%
-
- 64 ilmukebidanan.wordpress.com
Internet 12 words — < 1%
-
- 65 repository.ummat.ac.id
Internet 12 words — < 1%
-
- 66 repository.unpas.ac.id
Internet 12 words — < 1%

67	www.bphn.go.id Internet	12 words — < 1%
68	akangheriyana.wordpress.com Internet	11 words — < 1%
69	digilib.iain-jember.ac.id Internet	11 words — < 1%
70	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet	11 words — < 1%
71	info.animalproduction.net Internet	11 words — < 1%
72	infopublik.sijunjung.go.id Internet	11 words — < 1%
73	media.neliti.com Internet	11 words — < 1%
74	pdfslide.tips Internet	11 words — < 1%
75	repository.radenintan.ac.id Internet	11 words — < 1%
76	Natasia Alinsari, Aprina Nugrahesthy, Alfiananda Prasetya. "Sudahkan Asas Pengelolaan Keuangan Desa Terimplementasi?", Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 2022 Crossref	10 words — < 1%
77	Sri Winarsih Ramadana, Mariana Mariana, Rahmaniar Rahmaniar, Saiful Bahgia.	10 words — < 1%

"Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah", Owner, 2023

Crossref

78	fe-akuntansi.unila.ac.id Internet	10 words — < 1%
79	idoc.pub Internet	10 words — < 1%
80	peraturan.go.id Internet	10 words — < 1%
81	repository.uinsu.ac.id Internet	10 words — < 1%
82	wangibungamelati.blogspot.com Internet	10 words — < 1%
83	accurate.id Internet	9 words — < 1%
84	digilib.uinsby.ac.id Internet	9 words — < 1%
85	esakip.purwakartakab.go.id Internet	9 words — < 1%
86	islamicmarkets.com Internet	9 words — < 1%
87	jati.is.unikom.ac.id Internet	9 words — < 1%
88	journal.ubm.ac.id Internet	9 words — < 1%

89	peraturan.infoasn.id Internet	9 words — < 1%
90	repositori.umsu.ac.id Internet	9 words — < 1%
91	repository.ubharajaya.ac.id Internet	9 words — < 1%
92	www.bizhare.id Internet	9 words — < 1%
93	zukhrufarisma.wordpress.com Internet	9 words — < 1%
94	Andrianto Andrianto. "Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Pada Desa Ploso Kecamatan Jombang Tahun Anggaran 2012-2016", <i>Journal of Accounting Science</i> , 2018 Crossref	8 words — < 1%
95	Johannes Ronald Elyeser Roparulian Hutagalung. "Personnel Regulation at the Secretariat of the Attorney Commission of the Republic of Indonesia", <i>SIGn Jurnal Hukum</i> , 2023 Crossref	8 words — < 1%
96	core.ac.uk Internet	8 words — < 1%
97	digilib.stiestekom.ac.id Internet	8 words — < 1%
98	djpb.kemenkeu.go.id Internet	8 words — < 1%
99	ejournal.uniks.ac.id	

	Internet	8 words — < 1%
100	es.slideshare.net Internet	8 words — < 1%
101	ir.pgn.co.id Internet	8 words — < 1%
102	repository.uin-suska.ac.id Internet	8 words — < 1%
103	repository.unilak.ac.id Internet	8 words — < 1%
104	researchinlanders.be Internet	8 words — < 1%
105	sastradiaspora.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
106	telkom.co.id Internet	8 words — < 1%
107	www.hashmicro.com Internet	8 words — < 1%
108	www.jogloabang.com Internet	8 words — < 1%
109	www.slideshare.net Internet	8 words — < 1%
110	Faidhul Mannan, Dairani Dairani, Fathol Bari. "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH PEMERINTAHAN	7 words — < 1%

DESA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH",
HUKMY : Jurnal Hukum, 2024

Crossref

111 I Putu Santika, I Ketut Mustika, Ni Luh Kuni Hari. 7 words — < 1%
"PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN", Journal of Applied Management Studies, 2022
Crossref

112 Mardlia A. Buato, Niswatin Niswatin, Amir Lukum. 7 words — < 1%
"Pengaruh Pengendalian Internal dan Kecerdasan
Spiritual terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana
Desa di Kec. Buliyohuto", Reslaj : Religion Education Social Laa
Roiba Journal, 2023
Crossref

113 repo.iain-tulungagung.ac.id 7 words — < 1%
Internet

114 Bob Mustafa, Elsa Sari Yuliana. "Determinan Reviu 6 words — < 1%
Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", Eksos, 2020
Crossref

115 Imanuel Laurens Meyer Rompas, Lawren Julio 6 words — < 1%
Rumokoy. "PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO
EQUITY RATIO, DAN TOTAL ASSET TURNOVER TERHADAP
RETURN ON ASSET PERUSAHAAN SUB SEKTOR OTOMOTIF &
KOMPONEN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2021",
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan
Akuntansi, 2023
Crossref

116 Lisman Harefa. "PENERAPAN SAK ETAP PADA 6 words — < 1%
KOPERASI DALAM PENYAJIAN LAPORAN

KEUANGAN (Studi Kasus Koperasi Konsumen Tokosa Sahabat Sejati Gunungsitoli)", Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2023

Crossref

117 danielstephanus.wordpress.com 6 words — < 1%
Internet

118 desaciwidey.wordpress.com 6 words — < 1%
Internet

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES OFF